

KURIKULUM REKONTRUKSIONIS DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ILMU PENGETAHUAN SOSIAL: ANALISIS DOKUMEN KURIKULUM 2013

Mohammad Imam Farisi*

Jurusan Pendidikan IPS, FKIP Universitas Terbuka Surabaya

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji dan mendeskripsikan karakteristik kurikulum sekolah 2013 dan implikasinya terhadap sejumlah aspek substantif Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai mata pelajaran, mencakup aspek rekonstruksi definisi dan tujuan, kompetensi dasar, organisasi konten/isi, bahan belajar, mata pelajaran, dan pembelajaran serta implikasi kurikulum 2013 terhadap perubahan peran-peran pedagogis guru. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dari sumber-sumber primer. Sumber data berupa dokumen. Teknik analisis menggunakan teknik analisis isi yang difokuskan pada upaya untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis secara kritis unsur-unsur penting dalam dokumen. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sejarah pengembangan kurikulum sekolah Indonesia, setidaknya telah terjadi delapan kali perubahan kurikulum. Di antara perubahan kurikulum tersebut, kurikulum 2013 merupakan ikhtiar dan produk akademik yang sangat ilmiah, setelah kurikulum 1975. Aspek spesifik terpenting dan mendasar kurikulum 2013, yaitu penggunaan filsafat rekonstruksionisme sosial dan teori Gestalt sebagai landasan pengembangannya.

Kata kunci: kurikulum rekonstruksionis, ilmu pengetahuan sosial, kurikulum 2013

***Abstract:** This study aims to examine and describes the characteristics of curriculum 2013 and its implications to substantive changes in some aspects of the subject matter "Social Science". Those aspects include how to reconstruct the definition and objectives, basic competencies, organizational content, learning materials, subjects, learning process, and the implications of curriculum 2013 in changing the pedagogical roles of a teacher. This study uses literature review of primary sources, with documents as sources of data. The data was analyzed by content analysis technique that focused on the attempt to locate, identify, and critically analyze important elements in the document. The results of this study showed that the history of curriculum development in Indonesia has undergone eight changes of curriculum. Among these changes, curriculum 2013 is a scientific endeavor and academic product of after the implementation of curriculum 1975. The most important specific aspects of curriculum 2013 are the use of Social Reconstructionist philosophy and Gestalt theory for the development.*

Keywords: reconstructionist curriculum, social science, curriculum 2013

*Alamat korespondensi: UPBJJ-UT Surabaya, HP 08121612785, e-mail: imamfarisi@ut.ac.id

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Hal ini diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Kurikulum sebagai unsur strategis dalam pendidikan sekolah memiliki makna penting dalam mengembangkan peran sekolah sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan. Karena suatu sistem kurikulum yang dirancang secara sistematis akan menciptakan proses pembelajaran yang efisien dan efektif (Soedijarto, 2004: 91).

Secara konseptual, kurikulum adalah suatu respons pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsa. Kurikulum pendidikan yang baik hakikatnya harus bersifat antisipatoris dan prepatoris, selalu mengacu ke masa depan, dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk kehidupan masa depan yang jauh lebih baik, bermutu, dan bermakna (Buchori, 2001: 79). Secara paedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, kuri-

kulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan (Kemendikbud, 2012a: 2).

Sejarah pengembangan dan perubahan kurikulum sekolah kerap ditandai oleh perubahan-perubahan yang terjadi di internal dan eksternal pendidikan, termasuk perubahan filsafat dan paradigma yang mendasarinya. Setiap perubahan filsafat dan paradigma kurikulum akan berimplikasi lebih jauh terhadap sejumlah unsur struktural-substantif kurikulum, sebagian atau seluruhnya. Dalam sejarah pengembangan kurikulum sekolah Indonesia, setidaknya telah terjadi delapan kali perubahan kurikulum. Di antara perubahan kurikulum tersebut, Kurikulum 2013 dapat dikatakan merupakan ikhtiar dan produk akademik yang didasarkan atas hasil penilaian nasional pendidikan (*national assessment*), setelah kurikulum 1975 dan kurikulum PPSP (Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (1974–1981) (Soedijarto, 2004: 90).

Tulisan ini mengkaji dokumen kurikulum IPS 2013 yang difokuskan pada aspek spesifik terpenting dan mendasar, yaitu penggunaan filsafat rekonstruksionisme sosial dan teori Gestalt sebagai landasan pengembangannya. Hal ini dipandang penting karena kedua filosofis-teoretis tersebut berimplikasi terhadap rekonstruksi definisi dan tujuan, organisasi konten/isi, bahan belajar, mata pelajaran, dan organisasi pembelajaran IPS.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dari sumber-sumber primer (McMillan & Schumacher, 2001: 115-119), berupa do-

kumen Kurikulum 2013 dan dokumen Kompetensi Dasar SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang dipublikasikan oleh Kemendikbud. Analisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) (Silverman, 1995: 115-143; Sobur, 2002, 145-147) yang difokuskan pada ikhtiar untuk menemukan, mengidentifikasi, dan menganalisis secara kritis unsur-unsur penting di dalam dokumen, yaitu: organisasi konten/isi, bahan belajar, mata pelajaran, dan organisasi pembelajaran.

Prosedur analisis isi sebagai berikut: (1) Unitisasi data dalam unit-unit analisis terkait dengan unsur-unsur struktural-substantif kurikulum dan kompetensi dasar IPS; (2) Identifikasi dan analisis setiap muatan kurikulum yang dipandang penting dan bermakna terkait dengan organisasi konten/isi, bahan belajar, mata pelajaran, dan organisasi pembelajaran; (3) Kodifikasi, klasifikasi atau kategorisasi secara sistematis hasil temuan dan analisis yang terdapat di dalam dokumen kurikulum 2013 dan Kompetensi Dasar IPS. Sistem kodifikasi, klasifikasi atau kategorisasi data menggunakan *coding sheets* (Miles & Huberman, 1992:86-105); (4) konstruksi pola-pola logika internal dan makna-makna esensial yang dipandang menonjol (*emergent*) atau paling bermakna (*the most significant*) yang terungkap dari gagasan dan pemikiran Kurikulum 2013 tentang struktur-substantif organisasi konten/ isi, bahan belajar, mata pelajaran, dan organisasi pembelajaran secara utuh; (5) deskripsi kualitatif muatan kurikuler sehingga dapat menggambarkan keseluruhan (generalisasi) pemikiran kurikulum tentang struktur-substantif organisasi konten/ isi, bahan belajar, mata pelajaran, dan organisasi pembelajaran (Miles & Huberman, 1992: 392-393).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kurikulum 2013

Landasan Teori-Filsafat

Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan kurikulum sekolah 2013 dilandasi oleh filsafat rekonstruksionisme sosial dan teori Gestalt (Kemendikbud, 2012a:14,17; 2013a:8,137). Rekonstruksionisme sosial menjadi landasan filosofis-teoretis dalam rekonstruksi organisasi konten/isi, bahan belajar, dan mata pelajaran; dan teori Gestalt menjadi landasan teoretis dalam rekonstruksi organisasi pembelajaran.

Filsafat rekonstruksi sosial merupakan filsafat pendidikan dalam situasi krisis (*reconstructionism is a crisis philosophy*) (Brameld, 1965:32). Disebut demikian, karena rekonstruksionisme muncul ketika masyarakat dan budaya Amerika *...living in an age that is capable... of destroying mankind overnight...centers in a dislocation of the value patterns by which all cultures are guided...many members of the culture simply do not know what to believe as to what is good...* (Brameld, 1965:33); atau ketika masyarakat Amerika dihadapkan pada paham posmodernisme, globalisasi, dan persoalan-persoalan rasial (Banks & Clegg, 1985:3-4). Dalam situasi krisis seperti ini, pendidikan harus melakukan *therapeutic function*: (1) diagnosis dan prognosis atas faktor-faktor penyebab krisis; (2) modifikasi dan inovasi teori dan filsafat pendidikan bagi terciptanya keadaan yang relatif stabil, harmonis, dan seimbang dalam masyarakat di atas dasar-dasar sosial dan kultural baru (Brameld, 1965: 13).

Menurut filsafat ini, modifikasi dan inovasi teori dan filsafat pendidikan tidak harus dengan cara menemukan, merumuskan atau membangun sebuah teori dan

filosofis yang sama sekali baru. Rekonstruksi filosofis dapat saja dilakukan dengan memelihara kesinambungan pandangan filsafat-filsafat yang sudah ada; mengambil dan menggabungkan unsur-unsur terbaik dari setiap filsafat; dan merekonstruksi kembali menjadi sebuah filsafat-sintesis. Yang terpenting adalah bahwa nilai-nilai dan tujuan-tujuan dari setiap filsafat yang akan disintesis dipandang kontributif terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan dalam suatu masyarakat dan budaya demokrasi, sebuah *democratic world civilization* yang dicirikan oleh situasi sosial, politik, dan kultural yang tidak ada lagi pemilahan antarkelompok minoritas, superioritas, atau kelompok kepentingan tertentu (Brameld, 1965:37-38). Dengan kata lain bahwa rekonstruksionisme sebagai sebuah filsafat-sintesis tidak lain sebagai filsafat yang berupaya memadukan nilai-nilai atau tujuan-tujuan yang terbaik dari filsafat-filsafat sebelumnya atau sebuah filsafat *...built upon the rich thinking and experience of others philosophies of life and education borrows much from other philosophies, and makes no pretense to the contrary* (Brameld, 1965: 33).

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa filsafat rekonstruksionisme merupakan puncak dari evolusi filsafat kehidupan, kemanusiaan, dan pendidikan. Meminjam ungkapan sosiolog seperti Bell & Fukuyama bahwa filsafat rekonstruksionisme merupakan sejarah dan filsafat paling akhir. Pertama, filsafat rekonstruksionisme merupakan revitalisasi pemikiran dan filsafat pendidikan dari Plato, Aristoteles, Comenius, Pestalozzi, hingga Dewey. Kedua, demokrasi sebagai tujuan utama filsafat rekonstruksionisme *...may constituted the end point of mankind*

ideology...and as such... "the end of history". Ketiga, filsafat rekonstruksionisme lahir dan bangkit dari kesadaran nurani terdalam manusia untuk *finds its wisdom in pessimism, evil, tragedy, and despair* bagi sebuah tujuan mulia yaitu terciptanya *a democratic world civilization*. Keempat, yang paling fitriah karena filsafat rekonstruksionisme juga memasukkan dimensi keagamaan sebagai pilarnya, di tengah-tengah memuncaknya kehidupan masyarakat Amerika *...which separates the church and the state, and which regards public schools as agencies of the state rather than of the church* (Brameld, 1965: 75). Pandangan ini dikuatkan oleh Capra (2000: 11-29) yang menyatakan bahwa dewasa ini peradaban Barat (Amerika) telah berada pada *the turning point* menuju kehancurannya. Sebelum hal itu terjadi, perlu dilakukan perubahan paradigma ke arah sebuah visi realitas baru di dasarkan pada prinsip keseimbangan ekologis yang secara simbolis mensinergikan antara kekuatan *Yin* (rasional-inderawi) dan *Yang* (nurani dan agama) bagi terciptanya kedamaian dan harmoni peradaban manusia dan kemanusiaan secara menyeluruh.

Teori Gestalt adalah teori psikologi yang berpusat pada lima prinsip atau hukum tentang organisasi perseptual tentang fenomena, objek atau realitas (*laws of perceptual organization*). Teori ini sering dipandang sebagai antitesis dari teori atomisme atau strukturalisme. Berdasarkan prinsip atau hukum ini, teori Gestalt berpandangan bahwa pikiran dan tindakan manusia atas fenomena, objek atau realitas merupakan kesatuan atau keterpaduan yang utuh atau menyeluruh. *There are wholes, the behavior of which is not determined by that of their individual elements, but where the part-processes are them-*

selves determined by the intrinsic nature of the whole (Wertheimer, 1999:2).

Keterpaduan yang utuh dapat terjadi karena beberapa prinsip atau hukum organisasi perseptual (*the law of perceptual organization*) tentang objek atau realitas, yaitu: (1) *Similarity*, objek-objek yang dilihat dan dipersepsi secara visual sama atau memiliki kesamaan, cenderung dikelompokkan sebagai satu kesatuan kelompok atau pola; (2) *Pragnanz*, objek-objek sama atau memiliki kesamaan, cenderung diorganisasi atau direduksi menjadi bentuk yang sesederhana mungkin; (3) *Proximity*, objek-objek yang saling berdekatan, cenderung dikelompokkan atau dipersepsi sebagai satu kelompok/kesatuan; (4) *Continuation*, objek-objek yang terlihat sesungguhnya merupakan keberlanjutan atau pengulangan dari bentuk yang sama, dan mengikuti jalur paling halus (*smoothest path*); (5) *Closure*, kondisi ketika seseorang mampu melengkapi objek-objek yang dilihat atau dipersepsinya sebagai suatu kesatuan bentuk atau pola, sekalipun antarobjek terdapat ruang kosong atau informasi yang terputus (Cherry, 2013).

Dalam konteks kKurikulum 2013, filsafat rekonstruksionisme mengubah secara mendasar fungsi kurikulum. Kurikulum rekonstruksionis bersifat visioner, antisipatif, prepartoris, dan berorientasi pada masa depan; menyediakan ruang terbuka bagi peserta didik untuk mengkaji masalah-masalah sosial dan isu-isu kontroversi dari tangan pertama; dan memfasilitasi peserta didik membangun pengetahuan, sikap, dan kesadaran peserta didik bahwa masalah-masalah sosial dan isu-isu kontroversi dalam realitas kehidupan masyarakat merupakan *ethical space* bagi mereka untuk meningkatkan kualitas dirinya sebagai warga negara yang demo-

kratis, aktif-partisipatif dalam konteks lokal, nasional, dan dunia. Teori rekonstruksi sosial memberikan dasar pemikiran bahwa nama organisasi kurikulum dan isi atau konten kurikulum tidak terikat pada nama, isi atau konten disiplin ilmu apapun. Sementara itu, teori Gestalt memberikan dasar pemikiran bahwa pengalaman belajar di dalam Kurikulum 2013 harus integratif, terpadu, utuh dan tidak terpisah-pisah berdasarkan disiplin-disiplin ilmu tertentu. Integrasi konten menurut teori ini sangat penting, karena tingkat perkembangan peserta didik tidak cukup abstrak untuk memahami konten mata pelajaran secara terpisah-pisah.

Isi Kurikulum

Isi Kurikulum 2013 pada semua jenjang sekolah dirumuskan dalam bentuk kompetensi-kompetensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan tempat yang bersangkutan berinteraksi (Kemendikbud, 2012a:5). Konten terdiri dari pengetahuan, kemampuan intelektual, sikap dan kebiasaan, keterampilan sosial yang diorganisasi berdasarkan filosofi rekonstruksi sosial. Berdasarkan filsafat ini, konten kurikulum diorganisasi secara eklektik, terintegrasi, bersifat terbuka, dan dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu atau nondisiplin ilmu. Namun demikian, konten-konten tersebut tidak selalu terkait, terikat, dan diorganisasikan berdasarkan struktur konten disiplin ilmu, melainkan konten-konten yang bersifat fungsional bagi peserta didik (Kemendikbud, 2013a-c:8). Tugas pokok kurikulum adalah mengorganisasikan pengalaman-pengalaman budaya, dan mendidik mereka untuk bertindak dan berpartisipasi aktif perubahan budaya dalam

realitas kehidupan masyarakat (Brameld, 1965: 34).

Sejalan dengan prinsip eklektivisme-rekonstruksionis, konten/kompetensi kurikuler diorganisasi secara terintegrasi (vertikal dan horizontal) dalam bentuk kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD). KI menggambarkan secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. KI bukan konsep, generalisasi, topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan *disciplinary based curriculum* atau *content-based curriculum*, melainkan unsur organisatoris dan pengikat (*organizing element*) secara vertikal dan horizontal berbagai KD, KI sebagai organisasi vertikal, mengorganisasi keterkaitan antara konten KD satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas/jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara isi yang dipelajari peserta didik. KI sebagai organisasi horizontal, mengorganisasi keterkaitan antara isi KD satu mata pelajaran dengan isi KD dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat (Kemendikbud, 2013a-c: 4-5).

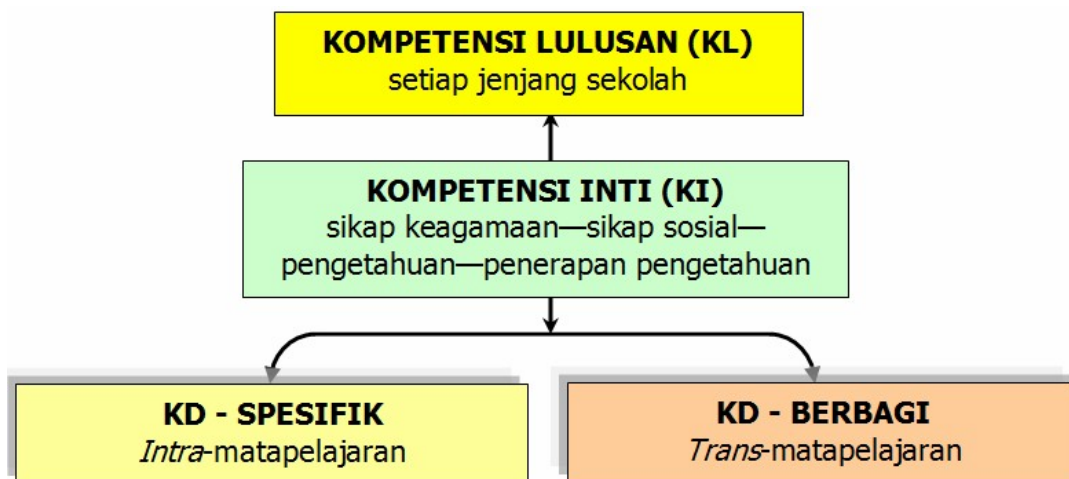
KI dikembangkan mengacu pada struktur kurikulum, dan merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan (SKL) jenjang pendidikan dasar, yang menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian *hard skills* dan *soft skills*, antara aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan, dan diorganisasi dalam empat kelompok yang saling terkait, yaitu: sikap keagamaan (KI-1); sikap sosial (KI-2); pengetahuan (KI-3); dan penerapan pengetahuan (KI-4). Keempat

kelompok KI tersebut menjadi acuan pengembangan KD dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (KI-3) dan penerapan pengetahuan (KI-4). Keempat kelompok KI tersebut dipelajari dan dimiliki peserta didik pada suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran melalui pembelajaran KD yang diorganisasikan dalam pembelajaran tematik integratif dengan pendekatan pembelajaran siswa aktif (Kemendikbud, 2013a-c: 5-6).

KD adalah kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari KI, dan dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antarmata pelajaran (Kemendikbud, 2012a:7; 2013a, b:5; 2013c:8). KD terdiri dari KD-spesifik, yaitu kompetensi khusus setiap mata pelajaran; dan KD-berbagi, yaitu kompetensi lintas mata pelajaran dan diorganisasikan dengan memperhatikan prinsip penguatan (organisasi horizontal) dan keberlanjutan (organisasi vertikal) sehingga memenuhi prinsip akumulasi dalam pembelajaran (Kemendikbud, 2012a:10). struktur organisasi konten kompetensi Kurikulum 2013 dapat dilihat pada Gambar 1.

Bahan Belajar

Bahan belajar (*instructional material*) diartikan sebagai *content that conveys the essential knowledge and skills of a subject in the school curriculum* (The Texas Constitution & Statutes, 2011) Bahan-bahan belajar tersebut merupakan konten wajib yang harus dipelajari dan dikuasai oleh setiap peserta didik dan terintegrasi pada setiap rumusan KI dan



Gambar 1. Struktur Organisasi Isi Kompetensi Kurikulum 2013

KD. Semua bahan-bahan belajar tersebut dikembangkan dan disesuaikan dengan kehidupan peserta didik sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warga negara yang produktif serta bertanggungjawab di masa mendatang (Kemendikbud, 2012a: 3). Secara konseptual, bahan-bahan belajar tersebut memuat respons kurikulum terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya, dan berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang. Dalam Kurikulum 2013, pemilihan dan pengorganisasian bahan-bahan belajar tidak semata berupa prestasi besar bangsa di masa lalu, tetapi juga hal-hal yang berkembang pada saat ini dan akan berkelanjutan ke masa mendatang. Termasuk berbagai perkembangan baru dalam ilmu, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik yang dihadapi masyarakat, bangsa dan umat manusia (Kemendikbud, 2012a:4).

Bahan-bahan belajar kurikuler tersebut terdiri dari: (1) pengetahuan: faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif terkait dengan agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban; (2) sikap: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif; (3) keterampilan: berpikir ilmiah, logis, analisis, dan pemecahan masalah; dan (4) permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan konten masing-masing mata pelajaran (Kemendikbud, 2013a-c:5).

Mata Pelajaran

Di dalam kurikulum 2013, mata pelajaran adalah label konten dan berfungsi sebagai unit organisasi konten terkecil di dalam kurikulum, bukan sebagai sumber dari konten (Kemendikbud, 2012a:6,15). Setiap mata pelajaran memuat konten spesifik (pengetahuan) dan konten berbagi, (sikap dan keterampilan yang berasal dari mata pelajaran lain). Dengan konsepsi ini, mata pelajaran secara langsung menjadi sumber bahan ajar yang spesifik dan berbagi untuk dikembangkan dalam dimensi proses suatu kurikulum. Prinsip filosofi rekonstruksi sosial juga menyebabkan nama-nama mata pelajaran tidak bisa diartikan sebagai nama-nama kelompok disi-

plin ilmu, juga tidak memiliki keterkaitan dan keterikatan pada nama disiplin ilmu (Kemendikbud, 2012a:7). Hal ini karena dalam pandangan filsafat rekonstruksi sosial, kedudukan semua disiplin ilmu adalah sama (Kemendikbud, 2012a: 17).

Di dalam kurikulum 2013, mata pelajaran pada setiap jenjang di organisasi menjadi dua kelompok. Pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI & SMP/MTs), terdiri dari: (1) Kelompok A, kelompok mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif; (2) Kelompok B, kelompok mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor (Kemendikbud, 2012a:13-15). Model pengelompokan mata pelajaran ini, juga pernah dilakukan di dalam kurikulum SD sebelumnya. Pengelompokan beberapa mata pelajaran tersebut dikenal Panca-Wardhana (1964) dan Tri-Wardhana (1968); Somantrie, 2010: 73, 80). Pada jenjang SMA/MA/SMK terdiri dari (1) mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik; (2) mata pelajaran peminatan (pilihan) yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya (Kemendikbud, 2012a:15-17).

Pembelajaran

Pada seluruh jenjang sekolah, pembelajaran diorganisasi untuk menguasai kompetensi-kompetensi (*competency based learning*), bukan pada penguasaan struktur disiplin ilmu (*disciplinary or content-based learning*) yang didasarkan pada prinsip belajar tuntas (*mastery learning*). Penguasaan kompetensi kognitif dan psikomotorik melalui pelatihan; dan kompetensi sikap melalui pembelajaran tak langsung (Kemendikbud, 2012a:7). Khusus pada jenjang SD, pembelajaran juga diorganisasi berdasarkan pendekatan tema-

atik terintegrasi, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam 2 hal, yaitu: (1) integrasi sikap, kemampuan/keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan (2) pengintegrasian berbagai konsep dasar yang berkaitan. Tema memberikan makna kepada konsep-konsep dasar, karena peserta didik mempelajarinya terkait dengan kehidupan nyata, dan dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Keduanya adalah pemberi makna yang substansial terhadap bahasa, PPKn, matematika, dan seni budaya karena keduanya adalah lingkungan nyata peserta didik dan masyarakat hidup (Kemendikbud, 2012a: 14).

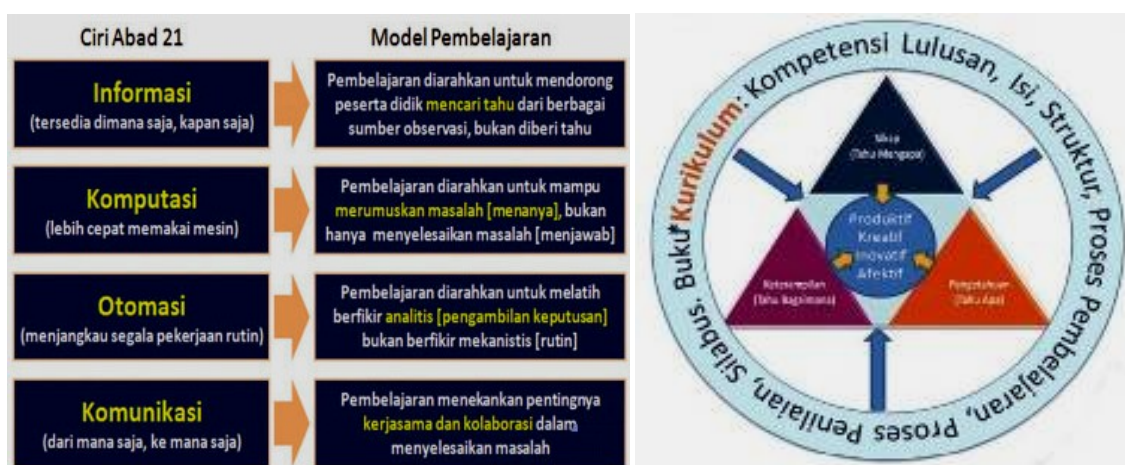
Sejumlah persoalan yang menjadi alasan penggunaan pendekatan tematik-integratif di tingkat SD di antaranya: (1) Konten kurikulum yang masih terlalu padat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak; (2) Belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional; (3) Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skills* dan *hard skills*, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum; (4) Belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global; dan (5) Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci

sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru (Kemdikbud, 2012b).

Pada tataran teoretik, pendekatan tematik-terintegrasi didasarkan pada teori psikologi Gestalt yang berpusat pada pandangan bahwa pikiran dan tindakan manusia atas fenomena, objek atau realitas merupakan kesatuan atau keterpaduan yang utuh atau menyeluruh, dan bukan agregasi dari setiap unsur-unsurnya. Teori Gestalt ini memberikan dasar pemikiran pada Kurikulum 2013 bahwa organisasi pembelajaran pada jenjang SD akan bermakna apabila dikembangkan secara integratif, terpadu, utuh, tidak terpisah-pisah berdasarkan sekat-sekat disiplin ilmu. Secara psikologis, tingkat perkembangan mereka pun dipandang tidak cukup abstrak

untuk memahami konten mata pelajaran secara terpisah-pisah. Dari sudut pandang *transdisciplinarity*, pengotakan konten kurikulum secara terpisah ketat juga dipandang tidak memberikan keuntungan bagi kemampuan berpikir peserta didik selanjutnya (Kemendiknas, 2012a:14).

Sejalan pula dengan paradigma belajar abad 21 yang dicirikan oleh empat karakteristik pokok, yaitu: informasi, komputasi, otomasi, dan komunikasi, maka pembelajaran juga perlu difokuskan pada penciptaan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif melalui penguatan sikap (tahu mengapa), keterampilan (tahu bagaimana), dan pengetahuan (tahu apa) yang terintegrasi (Kemendikbud, 2012c). Paradigma belajar abad 21 dalam konteks Kurikulum 2013 dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Paradigma Belajar Abad 21 dalam Konteks Kurikulum 2013

Berdasarkan keempat karakteristik pada Gambar 2, secara filosofis kurikulum 2013 menolak dan tidak terikat pada model dan kaidah kurikulum esensialisme dan perelialisme *an sich* dalam pengorganisasian konten/isi, mata pelajaran, dan pembelajaran (Kemendikbud, 2013c:8). Penol-

akan ini disebabkan karena kedua model dan kaidah kurikulum tersebut dipandang banyak mengandung kelemahan bagi, terutama dari sisi kepentingan peserta didik. Kurikulum esensialistik hanya memposisikan peserta didik sebagai penerima pasif (*passive recipient*) terhadap realitas dan

kebenaran yang secara ontologis berada di luar dirinya (Winataputra, 2001a:108; 2001b:19). Kurikulum esensialistik juga dipandang dapat menghambat perkembangan tahapan progresif mereka; mendistorsi dan merusak *genuine concepts* atau *indigenous science* mereka tentang alam semesta yang dibangun dan dikembangkan dari keseharian pengalaman sosial dan kulturalnya di masyarakat (Ellis, 1998: 7,64; Ogawa, 2002:2); bahkan dapat mendistorsi atau merusak *self-concept* siswa yang merupakan faktor esensial bagi pembentukan identitas atau karakter siswa (Sumantri, 2002:15). Studi PISA (*Program for International Student Assessment*) juga merekomendasikan perlunya perubahan orientasi kurikulum yang tidak membebani peserta didik dengan konten keilmuan secara terpisah-pisah, melainkan lebih pada upaya mengembangkan aspek kemampuan esensial, berupa pengetahuan dan keterampilan fungsional yang diperlukan semua warga negara untuk berperan serta dalam membangun negara pada masa mendatang.

Karakteristik IPS dalam Kurikulum 2013

Perubahan orientasi kurikulum 2013 ke arah model kurikulum rekonstruksionis berkonsekuensi lebih jauh terhadap berbagai aspek IPS, seperti definisi dan tujuan, konten/isi, bahan belajar, dan pembelajaran IPS. Namun demikian sejumlah pakar IPS sangat menerima filsafat ini dalam konteks IPS. Di satu sisi, kelahiran filsafat rekonstruksionisme diakui oleh Banks & Clegg (1985:4) sebagai titik awal perubahan transformatif yang menyeluruh terhadap konstruksi IPS sebagai mata pelajaran di dalam kurikulum sekolah dan sejalan dengan perubahan paradigma IPS

semenjak medio 1980-an, dari paradigma *Mainstream Academic Knowledge* ke paradigma *Transformative Academic Knowledge* (Banks, 1995: 2). Dari filsafat ini pula, lahir tradisi baru IPS, yaitu tradisi *reflective thinking/inquiry problem solving/social criticism* (Barr, Barth, & Shermis, 1978:116-167); atau tradisi *reconstructionism and public issues*. Sebuah tradisi dalam IPS yang menekankan pada dua dimensi pokok, yaitu: (1) Kritisisme sosial (*social criticism*) dan (2) Partisipasi sosial (*social participation*) (Zevin, 1992: 7-12).

Di sisi lain, teori Gestalt dan filsafat rekonstruksionisme sebagai paradigma Kurikulum 2013 menghasilkan struktur Kurikulum SD yang tidak lagi mengenal demarkasi disiplin keilmuan. Struktural kurikulum SD 2013 hakikatnya merupakan sebuah kurikulum sintesis yang mensinergikan berbagai keunggulan bidang kajian ke dalam sejumlah mata pelajaran sebagai unsur pengorganisasi konten. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pandangan Gestalt dan rekonstruksionisme yang menekankan hakikat keterpaduan secara utuh dari setiap unsur. Bahwa *every one of these seven areas...each one is suffering from tension between forces that tend to stabilize traditional patterns, and forces that tend to move toward more or less drastic modification of those patterns* (Brameld, 1965: 15); dan sesungguhnya *no one viewpoint will do but that it is desirable to mix many viewpoints together is eclecticism* (Brameld, 1965: 23).

Definisi dan Tujuan IPS

Dalam bidang keilmuan, definisi memiliki makna penting dalam teori dan praktik keilmuan, termasuk pendidikan. Menurut Kuhn (2001: 177-178), definisi merupakan salah satu unsur paradigma

keilmuan, dan lazim dinyatakan dalam bentuk sebuah pernyataan, frase, generasi simbolik yang digunakan sebagai hukum (legislasi). Sebuah definisi juga dinyatakan dalam bentuk seperangkat simbol yang melambangkan atau mendeskripsikan secara ringkas pendekatan, pemecahan, dan penjelasan atas realitas atau enigma-enigma yang dihadapi suatu bidang disiplin ilmu yang dinyatakan dalam suatu pola yang logis.

Di kalangan ahli IPS nasional dan internasional, untuk mencapai komitmen bersama atas sebuah definisi, bahkan telah melahirkan debat yang cukup lama. Di dalam dokumen Garis-garis Besar Bahan Diskusi pertemuan I Himpunan Sarjana Pendidikan IPS Indonesia (HISPIPSI) tahun 1990 kemudian diubah menjadi Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu Sosial Indonesia (HISPIISI) misalnya, dinyatakan bahwa persoalan akademik pertama yang perlu dijadikan agenda pembahasan adalah pengertian IPS. Dengan memiliki pengertian yang resmi tentang IPS, maka masyarakat ilmiah IPS akan berkembang serta dapat berkomunikasi dengan kelompok masyarakat ilmiah lainnya (Somantri, 2001:72). Historiografi IPS mencatat bahwa debat akademik terkait dengan definisi IPS cukup lama (1990-1998), dan tidak jarang mengarah pada sikap *tautologis* dengan pijakan epistemologis masing-masing (Winataputra, 2001a:24). Komitmen profesional atas definisi IPS baru tercipta dalam kongres HISPIPSI tahun 1998, dan sejak itu pula, definisi akademi IPS telah menjadi *shared commitment* dan *position paper* oleh komunitas pakar IPS.

Tahun 1980-an merupakan periode penting dimulainya upaya-upaya untuk mencapai konsensus akademik tentang definisi IPS. Pada periode itu, berbagai

dialog profesional dan publik mulai banyak diselenggarakan, buku-buku dan artikel-artikel tentang IPS mulai memasukkan isu, perspektif, atau dimensi baru (termasuk konstruktivisme), komisi-komisi reformasi kurikulum IPS dibentuk, asosiasi-asosiasi peneliti senior atau pusat-pusat penelitian dan pengembangan IPS pun mulai mencari bantuan dana untuk kepentingan penelitian (Armento, 1991: 185). Konsensus tentang definisi IPS tercapai tahun 1994 ketika NCSS merumuskan bahwa *Social studies is the integrated study of the social sciences and humanities to promote civic competence* (NCSS, 1994; 2010: vii,3) dan menegaskan bahwa keterpaduan merupakan karakteristik dan esensi dari kekuatan PIPS. *Social studies is powerful when they are meaningful, integrative, value-based, challenging, and active.* (NCSS, 1994:162; Barr, Barth, & Shermis. (1978: 18).

Konsensus atas rumusan definisi IPS terintegrasi dari NCSS tersebut dapat dipandang sebagai *asymptote* yang mampu menengahi berbagai kesalahpahaman dan debat berkepanjangan yang terjadi selama ini, sekaligus merefleksikan perubahan hakikat pengetahuan, didukung oleh pendekatan baru yang lebih terintegrasi untuk memecahkan isu-isu penting bagi kemanusiaan. Di satu sisi, IPS integratif memungkinkan siswa memahami arti penting masing-masing disiplin ilmu dan perspektif spesifiknya di dalam memahami topik-topik, isu-isu, dan ma-salah-masalah yang dikaji. Di sisi lain, IPS terintegrasi juga memungkinkan siswa mengenal bahwa topik-topik, isu-isu, dan masalah-masalah tersebut mampu melintasi batas-batas setiap disiplin dan membutuhkan kekuatan integrasi di dalam dan lintas disiplin (NCSS, 1994: 3).

Sejalan dengan konsensus atas rumusan definisi IPS terintegrasi dari CSS/NCSS tersebut, kurikulum 2013 juga mendefinisikan IPS sebagai mata pelajaran *integrative science* dan *integrative social studies*, bukan pendidikan pendidikan disiplin ilmu (Kemendikbud, 2013b:3). Secara konseptual, definisi IPS di dalam kurikulum 2013 merupakan hal baru yang sama sekali berbeda dibandingkan definisi-definisi sebelumnya. Selama ini definisi akademik dan kurikulum yang mengartikan IPS sebagai penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan disiplin ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pembelajaran (Somantri, 2001: 215; Depdiknas, 1999; 2002: 1-2). Ditegaskan oleh Hasan (1996: 64-65) bahwa definisi yang menyatakan bahwa IPS sebagai simplifikasi ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu sosial yang diajarkan di sekolah adalah definisi yang dikembangkan dari pandangan esensialisme; atau dikembangkan menurut tradisi *social studies taught as social sciences* (Barr, Barth, & Shermis, 1977: 61-63; 1978: 78-115).

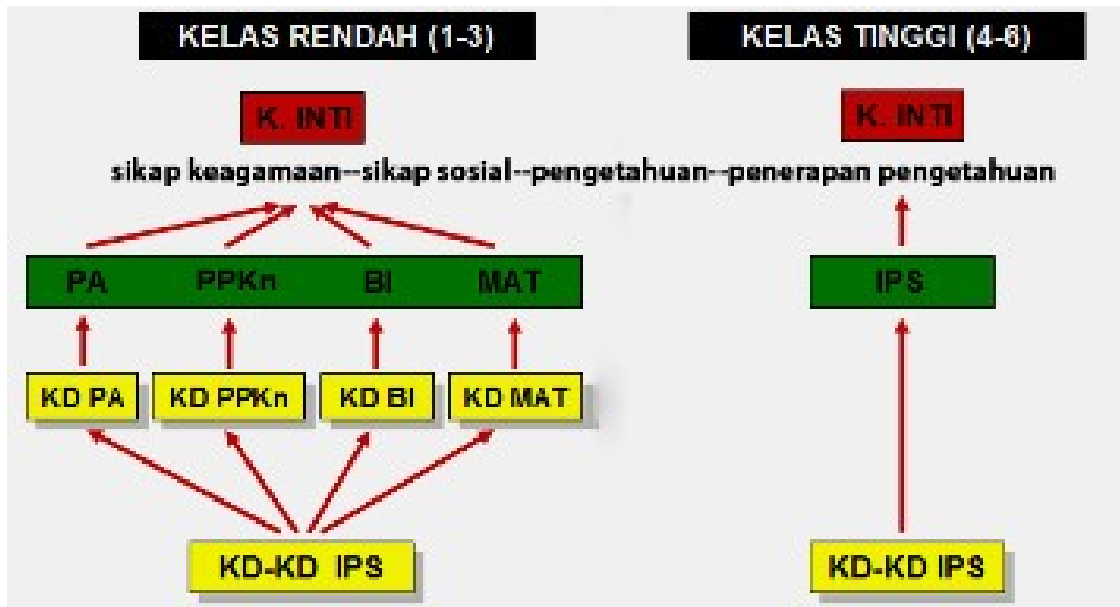
Definisi baru IPS ini menegaskan bahwa IPS adalah mata pelajaran yang berorientasi pada pendidikan aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Tujuan IPS menekankan pada pengetahuan tentang bangsanya, semangat kebangsaan, patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang atau *space* wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kemendikbud, 2013b:3). Definisi kurikuler IPS tersebut juga menegaskan bahwa IPS sebagai mata pelajaran tidak

identik atau bukan nama disiplin ilmu. IPS sebagai mata pelajaran hanyalah sebuah label konten dan berfungsi sebagai unit organisasi konten terkecil di dalam kurikulum, bukan sebagai sumber dari konten, dan tidak terkait dan/atau tidak memiliki kaitan struktural-fungsional dengan disiplin ilmu manapun, termasuk disiplin ilmu-ilmu sosial (Kemendikbud, 2012a: 6,15).

Kompetensi Dasar IPS

Konten IPS di dalam kurikulum 2013 diorganisasikan secara terintegrasi dalam bentuk KD-spesifik dan KD-berbagi. KD-spesifik IPS memuat kompetensi-kompetensi pengetahuan fungsional IPS khusus untuk jenjang kelas tinggi SD (kelas IV-VI) dan jenjang kelas SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. KD-berbagi IPS memuat kompetensi-kompetensi sikap dan keterampilan IPS khusus untuk kelas-kelas rendah SD (kelas I-III). Pada kelas-kelas rendah SD IPS tidak diajarkan sebagai mata pelajaran spesifik, terpisah, atau berdiri sendiri dengan KD yang spesifik. Karena itu, KD-IPS pada kelas rendah SD terdistribusi dan terintegrasi di dalam KD-KD mata pelajaran lain, seperti Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Kedua jenis KD-IPS tersebut dikembangkan berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antarmata pelajaran; serta secara langsung menjadi sumber bahan ajar yang spesifik dan berbagi untuk dikembangkan dalam dimensi proses kurikulum (Kemendikbud, 2012a:6). Standar kompetensi IPS pada jenjang SD dapat dilihat pada Gambar 3.

Selain itu, kedua KD-IPS tersebut tidak lagi dikembangkan berdasarkan atau bersumber sepenuhnya dari disiplin-disi-



Gambar 3. Struktur Kompetensi IPS pada Jenjang SD

plin ilmu sosial, dan juga tidak perlu memiliki keterikatan secara struktural-fungsional dengan disiplin-disiplin ilmu tertentu. Konten atau isi KD-IPS merupakan konten-konten yang terintegrasi dengan pembentukan karakter peserta didik secara utuh seperti tercermin di dalam keempat rumusan KI.

Hasil analisis dokumen kurikulum 2013 juga menunjukkan bahwa tidak semua KD-berbagi IPS termuat di dalam semua KD mata pelajaran pada jenjang kelas rendah SD. Realitas ini mengindikasikan adanya kesulitan yang dihadapi oleh para pengembang Kurikulum 2013 untuk mengidentifikasi kompetensi-kompetensi IPS, untuk selanjutnya dipetakan, didistribusikan dan diintegrasikan ke dalam KD-berbagai mata pelajaran SD kelas rendah secara jelas. Selain itu, di antara keempat rumusan KI pada semua jenjang kelas SD-SMA, rumusan KI-1 (sikap keagamaan) sama sekali tidak menggambarkan adanya unsur-unsur kompetensi IPS. Tidak adanya konteks atau lingkungan bagi imple-

mentasi atau perwujudan sikap keagamaan tersebut, merupakan faktor utama adanya kevakuman unsur-unsur kompetensi IPS di dalam rumusan KI. Hal ini berbeda dengan struktur rumusan pada KI 2-4, yang di dalamnya selalu memuat konteks atau lingkungan bagi implementasi atau perwujudan masing-masing kompetensi.

Bahan Belajar IPS

Bahan-bahan belajar IPS di dalam kurikulum 2013 ditekankan pada konten yang mampu merekonstruksi pengetahuan peserta didik tentang bangsanya, semangat kebangsaan, patriotisme, serta aktivitas masyarakat di bidang ekonomi dalam ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kemendikbud, 2013b: 3). Pola pengorganisasiannya tetap mempertahankan pendekatan lingkungan masyarakat yang semakin meluas (*expanding community approach*, *widening horizon*, atau *spiral curriculum approach*), dari diri-sendiri hingga lingkungan dunia (Ellis, 1998: 7-12; Taba, 1967: 19-32). Dengan beberapa modifikasi terhadap orientasi

dan pola skematiknya, model kurikulum ini dipandang cukup mampu menginfusi perspektif historikal dan global dalam kajian IPS pada semua jenjang kelas SD (Parry, 1990: 54).

Secara umum, bahan-bahan belajar yang menjadi muatan kompetensi IPS terdiri dari: (1) pengetahuan: faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif terkait dengan kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam beragam konteks interaksi sosial di lingkungannya (setempat, sekolah, nasional, dan dunia). Konten-konten pengetahuan tersebut bukan merupakan konten keilmuan (*scientific knowledge*) melainkan pengetahuan fungsional (*functional knowledge*) yang berkaitan langsung dengan realitas kehidupan manusia dan masyarakatnya, masalah-masalah yang dihadapi, beserta upaya-upaya pemecahannya; (2) sikap: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, gotong royong, kerja sama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif yang sangat diperlukan oleh peserta didik dalam interaksi sosialnya dengan beragam konteks lingkungan komunitas (keluarga, teman, guru, tetangga, bangsa, dan antarbangsa); (3) keterampilan: berpikir ilmiah, logis, analisis, pemecahan masalah sosial, dan partisipasi sosial. Keterampilan-keterampilan tersebut bersifat keterampilan-spesifik IPS, maupun keterampilan berbagi yang terintegrasi di dalam mata-mata pelajaran lain; dan (4) permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat yang secara spesifik menjadi muatan mata pelajaran lain dan/atau permasalahan aktual yang terintegrasi di dalam konten mata-mata pelajaran lain (Kemendikbud, 2013a-c: 5).

Di antara keempat bahan belajar IPS tersebut, yang spesifik dan penting

dari kurikulum 2013 terkait dengan filsafat rekonstruksionisme sosial adalah bahan belajar keempat, yaitu permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat. Masalah-masalah aktual tersebut berupa: (1) masalah spesifik dalam KD-IPS; dan (2) masalah berbagi di dalam mata pelajaran lain dalam konteks kehidupan sosial. Masalah-masalah spesifik IPS di antaranya terkait dengan: lingkungan hidup (kelas V dan VIII); gangguan keseimbangan alam akibat ulah manusia dan implikasinya secara luas (kelas V); fungsi dan peran kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di lingkungan masyarakat sekitar (kelas VIII dan IX); lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi sebagai akibat adanya dinamika interaksi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (kelas IX); dan masalah bangsa dan negara Indonesia (Sejarah kelas XII). Masalah berbagi di dalam mata pelajaran lain dalam konteks kehidupan sosial di antaranya terkait dengan: penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, waktu, panjang, berat benda dan uang terkait dengan aktivitas sehari-hari di rumah, sekolah, atau tempat bermain (Matematika kelas II). Termasuk dalam hal ini adalah pemanfaatan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dalam memecahkan permasalahan sosial di daerah (Bahasa Indonesia kelas III); dan pemanfaatan konsep aljabar, model-model matematika, prinsip-prinsip transformasi (dilatasi, translasi, pencerminan, rotasi) dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sosial (Matematika kelas VII).

Pembelajaran IPS

IPS adalah mata pelajaran *integrative science* dan *integrative social studies*, dan bukan pendidikan disiplin ilmu. Sebagai mata pelajaran terintegrasi, pembelajaran IPS dikembangkan berorientasi pa-

da pendidikan aplikatif, pengembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, dan pengembangan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial (Kemendikbud, 2013b: 3). Studi Noviani (2010: 184-186) menunjukkan bahwa pembelajaran IPS terpadu (*integrated learning*) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis; dan memungkinkan peserta didik baik individual maupun kelompok aktif-partisipatif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik. Melalui pembelajaran terpadu peserta didik juga dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. Mereka juga terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari. Namun demikian, Noviani (2010) mengingatkan bahwa pembelajaran terpadu membutuhkan waktu, kejelian, ketepatan memetakan kompetensi dasar menjadi tema tertentu juga membutuhkan pengamatan aspek afektif siswa serta kesiapan semua pihak, yaitu guru dan siswa.

Dalam kaitan ini, Fairey, Lee & Bennett (2000: 3-9) menekankan perlunya integrasi teknologi ke dalam pembelajaran IPS dan merekomendasikan sebuah model konseptual integrasi teknologi pembelajaran (*instructional technology*) berdasarkan kelima visi *powerful* dari NCSS. Integrasi teknologi dalam pembelajaran IPS juga efektif meningkatkan kinerja peserta didik dan pembelajaran (Doolittle & Hicks, 2003: 72; Ayas, 2006: 23-24). Selain itu, berpengaruh positif dalam memfasilitasi mereka dalam mengonstruksi pengetahuan melalui kolaborasi, motivasi, pelibatan, dan rasa kepemilikan diri (*sense of ownership*) (Diem, 2000: 497-495; Whitworth &

Berson, 2003: 483-484; Berson & Van-Fossen, 2008: 219-220) serta sangat potensial untuk meredusi kecenderungan pemerolehan fakta-fakta yang tak bermakna, koneksi yang tidak tepat, cakupan konten yang hanya bersifat superfisial, dan pembentukan pengetahuan secara pasif (Fairey, Lee, & Bennett, 2000: 3-9). Salah satu model integrasi yang paling populer dan diterima luas di kalangan pakar IPS adalah model *Science Technology, and Society* dan mengakomodasinya sebagai salah satu standar tematik IPS untuk mendorong dan memperkokoh warga negara yang bertanggung jawab (NCSS, 1994; 2010: 87,162-165). Integrasi model STS dipandang mampu merepresentasikan tipologi perubahan paradigma Kuhnian dalam hal tujuan, proses dan orientasi pembelajarannya (*student-centered*). Hal ini tercermin di dalam empat komponen kurikuler, yaitu: fungsi, konten, stuktur terpadu, dan sekuensi STS menggambarkan sukses integrasi dari berbagai kajian disiplin ilmu, antropologi, sejarah, ilmu politik, sosiologi, sains, dan teknologi (Aikenhead; 1992: 27-35).

Untuk mewahani sifat integratif tersebut, pembelajaran IPS diorganisasikan berdasarkan tema-tema, yaitu topik, ide atau konsep utama yang berfungsi pengintegrasikan berbagai konten/isi dari berbagai mata pelajaran secara utuh/terpadu. Tema merupakan *a way of organizing knowledge about the human experience, and the constitute the organizing strands that should thread through a social studies program from grades pre-K through 12* (NCSS, 2010:3). Pendekatan tematik merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran IPS yang menekankan pada arti penting *making connections in knowledge, skill, and attitude...and they provide expe-*

riences that are broad and rich enough in detail to enable students to connect their learning with real life (Ward, 2003: 13.3,5). Melalui pendekatan tema (tematik) diharapkan peserta didik tidak mempelajari konsep dasar tanpa terkait dengan kehidupan nyata, sehingga mampu memberikan makna kepada peserta didik. Untuk mengembangkan dan memantapkan fokus kajian, dan meningkatkan kebermaknaan unit-unit tematik bagi peserta didik, serta mendorong mereka mampu beraktualisasi diri, terpelajar, dan berkontribusi pada keanggotaan masyarakat global.

Horton & Barnett (2008:18-25) merekomendasikan perlunya penekanan pada konsep-konsep yang mampu membangun pengertian besar (*big understanding*) terhadap tema-tema yang dikaji. Untuk tujuan tersebut, mereka mengajukan enam langkah yang perlu dilakukan guru, yaitu: (1) batasi lingkup unit agar kajian bisa lebih mendalam; (2) identifikasi dan fokuskan pada aspek-aspek penting dari tema; (3) rumuskan sebuah generalisasi untuk menciptakan sebuah pengertian besar; (4) buat simpulan terhadap unit kajian; (5) introduksi unit untuk menarik minat peserta didik; dan (6) bangun tubuh unit kajian dengan membuat kaitan-kaitan bermakna antara substansi, pertanyaan, aktivitas, dan evaluasi. Sementara itu, sejumlah studi menunjukkan bahwa pendekatan tematik sangat bermakna untuk memfasilitasi banyaknya bahan-bahan belajar dan memudahkan peserta didik untuk mengorganisasi dan menguasainya dengan baik (Wurman, Leifer & Sume, 2000: 27-29); meningkatkan kemampuan siswa menuntaskan tugas-tugas belajarnya, serta membangun kesadaran diri mereka atas kapasitas kognitif, afektif, dan

keterampilan motorik yang dimiliki secara utuh (Sukadi, 2005: 14; Dilek, 2007:1). Studi Andayani (2008: 97-98) juga menunjukkan bahwa pendekatan tematik mampu meningkatkan aktivitas dan efektivitas interaksi dan komunikasi multiarah antara siswa-siswa, siswa-guru; siswa mampu mengungkapkan ide, bertanya, dan menjawab pertanyaan dengan santai dan gembira.

Kurikulum 2013 tidak mencantumkan tema-tema yang digunakan dalam pembelajaran IPS, kecuali memberikan sedikit acuan bahwa sebuah tema dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia yang dekat dan bisa dialami secara langsung oleh peserta didik (Kemendikbud, 2012a:14). Hasil analisis muatan kompetensi IPS, terdapat sejumlah tema yang dapat diidentifikasi di dalam Kurikulum 2013 (cf. NCSS, 1994; 2010:21-30), yaitu: (1) Agama, difokuskan pada pembelajaran tentang bagaimana peserta didik menerima, menghayati, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, terutama penciptaan waktu dengan segala perubahannya perilaku keagamaan dalam konteks kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam masyarakat; (2) Penduduk, tempat, dan lingkungan: difokuskan pada pembelajaran tentang aspek keberagaman aspek keruangan, konektivitas antarruang; hubungan antara manusia dengan kondisi geografis; pengaruhnya terhadap dinamika interaksi dan perilaku penduduk terhadap tempat dan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi; (3) Waktu, keberlanjutan, dan perubahan: difokuskan pada pembelajaran tentang perubahan, dinamika, dan keberlanjutan dalam waktu dalam konteks sejarah, sosial, budaya, agama, ekonomi, politik, dan pendidikan; konektivitas antar ruang, waktu,

perubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya dalam masyarakat Indonesia; serta arti penting peristiwa-peristiwa sejarah dan perkembangannya mampu membentuk manusia Indonesia modern; (4) Individu, kelompok, dan kelembagaan: difokuskan pada pembelajaran tentang kelembagaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya masyarakat; fungsi dan perannya bagi manusia; sikap dan perilaku individu dalam kehidupan kelompok dan kelembagaan; (5) Budaya, difokuskan pada kajian tentang budaya dan keberagamannya; bagaimana manusia Indonesia menciptakan, belajar, berbagi, dan mengadaptasi budaya, dan mengapresiasi peran budaya dalam membentuk kehidupan mereka dan masyarakat; (6) Teknologi: difokuskan pada kajian tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta permasalahan sosial yang ditimbulkan; (7) Pemerintahan dan kedaulatan, difokuskan pada kajian tentang karakteristik pemerintahan Indonesia dari masa kerajaan hingga masa kini; makna pemerintahan bagi kehidupan kebangsaan Indonesia masa kini dalam konteks NKRI Indonesia; hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah; serta integrasi nasional dalam bingkai bhinneka tunggal ika; (8) Produksi, distribusi, dan konsumsi, difokuskan pada kajian tentang organisasi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa; serta isu-isu ekonomi domestik dan global; (9) Globalisasi, difokuskan pada kajian tentang saling ketergantungan secara global antar masyarakat di dunia; dan isu-isu terkait semakin meningkatnya globalisasi; dan (10) Praktik dan cita-cita ideal warga negara: difokuskan pada kajian tentang cita-cita dan praktik kewarganegaraan,

mencakup sikap positif dan bangga terhadap nilai-nilai budaya bangsa, partisipasi penuh peserta didik dalam kehidupan masyarakat, serta hak dan kewajiban warga negara di negara demokrasi.

Agar lebih efektif dan bermakna, tema dikembangkan dari isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang yang dirumuskan dalam bentuk situasi bermasalah (*problematic condition*) yang dapat dikaji dan dipecahkan dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu-ilmu sosial secara terpadu (Noviani, 2010: 176). Beberapa contoh isu, peristiwa, dan masalah sosial yang dapat dijadikan tema antara lain: masalah lalu lintas dan transportasi (Andayani, 2008: 95); kegiatan ekonomi masyarakat; masalah lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya; pelestarian lingkungan; atau penyimpangan sosial dalam masyarakat (Noviani, 2010:179-183).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 merupakan sebuah kurikulum rekonstruksionis, yakni kurikulum yang dikembangkan oleh dua teori-filsafat, rekonstruksionisme dan Gestalt. Secara substantif, kurikulum 2013 merekonstruksi secara mendasar sejumlah aspek penting IPS sebagai mata pelajaran, seperti definisi dan tujuan, organisasi konten/isi, bahan belajar, makna mata pelajaran, dan pembelajaran. Karakter rekonstruksionis Kurikulum 2013 ini memberikan makna penting bagi IPS sebagai titik awal terjadinya perubahan transformatif yang menyeluruh terhadap konstruksi IPS sebagai mata pelajaran di dalam kurikulum sekolah. Terutama bagi pengembangan tradisi baru IPS sebagai pendidikan berpikir reflektif, kritisisme dan

partisipasi sosial yang oleh para pakar dipandang sebagai perkembangan mutakhir dalam pengembangan IPS sebagai program pendidikan di sekolah.

Perubahan kurikulum ini memiliki sejumlah implikasi penting terutama bagi guru, karena guru sebagai ujung tombak penerapan kurikulum, dan kunci sukses implementasi Kurikulum 2013 di sekolah yang diharapkan bisa menyiapkan dan membuka diri terhadap beberapa kemungkinan terjadinya perubahan. Terkait dengan hal tersebut ada beberapa hal yang dapat disarankan.

Pertama, guru perlu melakukan rekonstruksi peran-peran pedagogisnya yang dicirikan oleh kemampuan pedagogis sebagai: (1) pengambil keputusan (*decision maker*), guru mampu menstimulasi siswa untuk berpikir, bersikap, dan bertindak aktif dan reflektif dalam belajar serta mendorong terjadinya dialog, dan melakukan evaluasi diri terhadap gagasan, nilai, sikap, dan tindakan yang diambil; (2) *reformer* yang reflektif (*reflective reformer*), guru bersikap terbuka untuk mengeksplorasi gagasan dirinya; mampu berpikir kritis reflektif daripada berpikir secara kategorial mampu mentoleransi terjadinya konflik gagasan dan cita-cita antara dirinya dengan siswa; mampu mengenali nilai-nilai yang bersifat kontroversial; memiliki kesadaran bahwa pengetahuan bersifat relatif dan probabilistik terhadap konteks; (3) partisipan kooperatif (*cooperative participant*), guru selalu terbuka untuk bekerjasama dengan siswa di dalam berbagai aktivitas belajar yang dilakukan, mendorong para siswa untuk menggunakan cara-cara berpikir alamiah dan intuitifnya; (4) agen katalisator (*catalytic agent*) bagi hasil-hasil penemuan siswanya; (5) peran didaktik (*didactic roles*),

guru berperan reflektif dan afektif, yakni pengembang konsep siswa, dan pengembang keterampilan siswa dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam berbagai isu, nilai, kepercayaan yang seringkali bersifat kontroversial.

Kedua, untuk mendukung perubahan peran-peran pedagogis guru tersebut, pemerintah perlu memberikan bantuan profesional kepada guru dalam implementasi Kurikulum 2013 melalui: (1) pelatihan-pelatihan profesional guru secara sistemik dan berkala, terutama pelatihan tentang penelitian tindakan kelas (PTK); (2) pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru yang terjamin kualitas isinya sesuai dengan karakteristik konten dan bahan ajar Kurikulum 2013; (3) pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi, dan budaya sekolah (budaya kerja guru) yang kontributif bagi pengembang peran-peran pedagogis guru; (4) pendampingan dalam bentuk monitoring dan evaluasi sistemik, berkala, dan berkelanjutan untuk menemukan kesulitan dan masalah yang dihadapi guru dalam implementasinya; dan (5) memfasilitasi upaya peningkatan penguasaan guru terhadap beragam perangkat teknologi informasi dan komunikasi terutama internet untuk pembelajaran.

Ketiga, pemerintah juga perlu melakukan: (1) evaluasi kurikulum secara formatif dan sumatif secara menyeluruh untuk memperoleh bukti-bukti empirik atas kelayakan dan efektivitas ide, dokumen, dan implementasinya sesuai dengan konteks dan daya dukung guru, siswa, dan lingkungan pembelajaran; (2) mengidentifikasi kendala dan masalah dalam implementasinya, dan merumuskan solusi-solusi alternatif dan strategis sebagai langkah antisipasi dan upaya perbaikannya; (3)

memperkokoh peran PTK oleh guru sebagai salah satu metode dan prosedur uji kontekstual efektivitas Kurikulum 2013 dalam berbagai realitas konteks pembelajaran, dan bagi peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

Keempat, lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) sejak awal perlu mengakomodasi dan mengintegrasikan

perubahan-perubahan penting Kurikulum 2013 ke dalam struktur kurikulum pendidikan guru; bahan/materi pembelajaran; dan sistem evaluasinya, sehingga setiap lulusannya memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan kurikuler yang dituntut oleh Kurikulum 2013, termasuk integrasi teknologi ke dalam kurikulum LPTK.

DAFTAR PUSTAKA

- Aikenhead, Glen S. 1992. "The Integration of STS Into Science Education" dalam *Theory into Practice*, Volume 31, Nomor 1, Winter 1992, halaman 27-35.
- Andayani. 2008. "Aplikasi Pendekatan Tematis untuk Pembinaan Kompetensi Komunikatif Bahasa Indonesia pada Siswa SLTP" dalam *Paedagogia: Jurnal Penelitian Pendidikan*, Jilid 11, Nomor 2, Agustus 2008, halaman 91 – 100.
- Armento, Beverly J. 1991. "Changing Conceptions of Research on Teaching of Social Studies" dalam James P. Shaver (Ed.). *Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning*. New York: McMillan Publishing Company.
- Ayas, Cemalettin. 2006. "An Examination of the Relationship Between the Integration of Technology Into Social Studies and Constructivist Pedagogies" dalam *The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET*, Volume 5, Nomor 1, January 2006, halaman 14-25.
- Banks, James A. & Clegg, Ambrose A. 1985. *Teaching Strategies for the Social Studies* (Third Edition). New York: Longman, Inc.
- Banks, James A. 1995. "Transformative Challenges to the Social Sciences Disciplines: Implications for Social Studies Teaching and Learning" dalam *Theory and Research in Social Education Journal*, Volume XXIII, Nomor 1, halaman 2-20.
- Barr, Robert D.; Barth, James L.; & Shermis, S. Samuel. 1977. *Defining the Social Studies*. Virginia: National Council for the Social Studies.
- Barr, Robert D.; Barth, James L.; & Shermis, S. Samuel. 1978. *The Nature of the Social Studies*. Palm Spring CA: ETC Publications.
- Berson, Michael J. & VanFossen, Philip J. 2008. "Another Look at Civic Literacy in A Digital Age" dalam *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, Volume 8, Nomor 3, halaman 219-221.
- Brameld, Theodore. 1965. *Education As Power*. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc.
- Buchori, Mohammad. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.

- Capra, Fritjof. 2000. *Titik Balik Peradaban: Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan* (Terjemahan oleh Moch. Thoyibi). Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Cherry, Kendra. 2013. "What is Gestalt Psychology?" dalam http://psychology.about.com/od/sensationandperception/ss/gestaltlaws_2.htm, diunduh 7 Juli 2013.
- Diem, Richard A. 2000. "Can It Make A Difference? Technology and The Social Studies" dalam *Theory & Research in Social Education*, Volume 28, Nomor 4, Fall 2000, halaman 493-501.
- Dilek, Dursun. 2007. "Using A Thematic Teaching Approach Based on Pupil's Skill and Interest in Social Studies Teaching" dalam *The International Journal*, Volume 71, halaman 1-8.
- Doolittle, Peter E., & Hicks, David. 2003. "Constructivism as A Theoretical Framework for the Use of Technology in Social Studies" dalam *Theory and Research in Social Education*, Volume 31, Nomor 1, halaman 71-103.
- Ellis, Arthur K. 1998. *Teaching and Learning Elementary Social Studies* (Sixth Edition). Boston: Allyn & Bacon.
- Fairey, Chad; Lee, John K.; & Bennett, Clifford. 2000. "Technology and Social Studies: A Conceptual Model for Integration" dalam *Journal of Social Studies Research*, Volume 24, Nomor 2, Winter 2000, halaman 3-9.
- Hasan, Said Hamid. 1996. *Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial (Buku Satu)*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS-IKIP.
- Horton, Todd A. & Barnett, Jennifer A. 2008. "Thematic Unit Planning in Social Studies: Make It Focused and Meaningful" dalam *Canadian Social Studies*, Volume 41, Nomor 1, Fall 2008, halaman 18-25.
- Kemendikbud. 2012a. *Dokumen Kurikulum 2013*. Jakarta: Puskur-Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2012b. "Uji Publik Kurikulum 2013: Penyederhanaan, Tematik-Integratif" dalam <http://www.kemdikbud.go.id/uji-publik-kurikulum-2013-1.html>, diunduh 10 Oktober 2013.
- Kemendikbud. 2012c. "Pergeseran Paradigma Belajar Abad 21" dalam <http://www.kemdikbud.go.id/uji-publik-kurikulum-2013-2.html> diunduh 10 Oktober 2013.
- Kemendikbud. 2013a. *Kurikulum 2013: Kompetensi Dasar Sekolah Dasar SD/Madrasah Ibtidaiyah/MI*. Jakarta: Puskur-Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2013b. *Kurikulum 2013: Kompetensi Dasar Sekolah Menengah Pertama SMP/Madrasah Tsanawiyah MTs*. Jakarta: Puskur-Kemendikbud.
- Kemendikbud. 2013c. *Kurikulum 2013: Kompetensi Dasar Sekolah Menengah Atas SMA/Madrasah Aliyah MA*. Jakarta: Puskur-Kemendikbud.
- Kuhn, Thomas S. 2001. *The Structure of Scientific Revolutions: Peran Paradigma dalam Revolusi Keilmuan* (Terjemahan oleh Tjun Surjaman). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- McMillan, James H. & Schumacher, Sally. 2001. *Research in Education: A Conceptual Introduction*. New York: Addison Wesley Longman, Inc.
- Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru* (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press.
- NCSS. 1994. *Expectations of Excellence: Curriculum Standards for Social Studies*. Washington: NCSS.
- NCSS. 2010. *National Curriculum Standards for Social Studies: A Framework for Teaching, Learning, and Assessment*. Silver Spring, MD: NCSS.
- Noviani, Leny. 2010. “Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui *Integrated Learning* pada Mata Pelajaran IPS SMP” dalam *Paedagogia: Jurnal Penelitian Pendidikan*, Jilid 13, Nomor 2, Agustus 2010, halaman 173 – 187.
- Ogawa, Masakata. 2002. “Science As the Culture of Scientist: How to Cope with Scientism?” dalam www.ouhk.edu.hk/cridal/misc/ogawa.htm diunduh 27 Januari 2013.
- Parry, Lindsay. 1990. “Paul R.. Hanna and the Expanding Communities of Social Reality: An Alternative Perspective” dalam *Australasian Journal of American Studies*, Volume 9, Nomor 2, December, 1990, halaman 47-56.
- Silverman, David. 1995. *Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction*. London: SAGE Publications.
- Sobur, Alex. 2002. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soedijarto. 2004. “Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan Tenaga Pendidikan sebagai Unsur Strategis dalam Penyelenggaraan Sistem Pengajaran Nasional” dalam *Jurnal Pendidikan Penabur*, Nomor 03, Tahun III, Desember 2004, halaman 89-107.
- Somantri, Muhammad Numan. 2001. *Menggagas Pembaharuan Pendidikan*. Dedi Supriadi & Rochmad Mulyana (Eds). Bandung: PPS, FPIPS UPI dan PT Remaja Rosdakarya.
- Sukadi. 2005. “Pendidikan IPS yang *Powerful* dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Nomor 4 , Tahun XXXVIII, Oktober 2005, halaman 1-23.
- Taba, Hilda. 1967. *A Teacher's Handbook To Elementary Social Studies*. Palo Alto, CA: Addison-Wesley.
- The Texas Constitution & Statutes. 2011. “November 2011 Education Code: Instructional Materials” (Chapter 31) dalam <http://www.statutes.legis.state.tx.us/Index.aspx>, diunduh 17 Oktober 2013.
- Ward, Geoff. 2003. “Using Theme Cycles” dalam *Total Literacy: Reading, Writing and Learning*. Wadsworth/Thomson Learning, Belmont, CA.

- Wertheimer, Max. 1999. "Gestalt Theory" dalam *Gestalt Theory Journal*, Volume 21, Nomor 3, November 1999, halaman 181-183.
- Whitworth, Shellia A., & Berson, Michael J. 2003. "Computer Technology in the Social Studies: An Examination of the Effectiveness Literature (1996-2001)" dalam *Contemporary Issues in Technology and Teacher Education*, Volume 2, Nomor 4, halaman 472-509.
- Winataputra, Udin Saripudin. 2001a. "Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS", dalam *Disertasi* tidak dipublikasikan, Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Winataputra, Udin Saripudin. 2001b. "Reorientasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Mengantisipasi Perubahan Sosial di Era Global", dalam *Makalah* disajikan dalam Seminar Nasional dan Kongres Forum Komunikasi X Pimpinan FPIPS/FIS/FKIP Universitas/IKIP se Indonesia serta Kongres HISPIPSI di Universitas Negeri Semarang, 22-24 Oktober 2001.
- Zevin, Jack. 1992. *Social Studies for the Twenty-First Century*. New York & London: Longman.